

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Formasi Modal Sosial di Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember

Peneliti : Ciplis Gema Qori'ah, SE, M.Sc¹
Mahasiswa Terlibat : 1. Lailatul Maghfiroh, SE²
2. Cintya Meidia Tama³
3. Mela Yunita⁴
4. Ika Nurjannah⁵

Sumber Dana : DIPA/ BOPTN Universitas Jember

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan ekonomi yang kompleks dan multidimensi yang menyangkut beberapa aspek; diantaranya aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Oleh karenanya dalam perspektif teori kemiskinan tidak saja dipengaruhi secara dominan faktor pengetahuan ekonomi, namun juga dalam ranah keilmuan sosial. Lebih daripada itu, secara umum kondisi kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan. Kabupaten Jember menempati *pole position* jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial pada September tahun 2011 dan Susenas bulan Maret 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebanyak 237.700 kepala keluarga (KK) tertinggi dibandingkan 37 kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan posisi kedua ditempati Bondowoso dengan 167.366 kepala keluarga (KK). Ketiga ditempati kabupaten Malang dengan jumlah 155.845 kepala keluarga (KK). Sekitar 2,3 juta jumlah penduduk di Kabupaten Jember jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso hanya sekitar 800 ribu atau sepertiga dari jumlah penduduk Kabupaten Jember. Sehingga berdasarkan prosentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya dibentuk kelompok dan jejaring kerja, artinya kegiatan sosial yang banyak diikuti oleh masyarakat adalah

kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial seperti PKK, kerja bakti sosial. Selain itu faktor kepercayaan masyarakat terhadap sebagian besar orang-orang disekelilingnya dapat dipercaya. Aksi kolektif dan kerjasama antar warga sangat menentukan eksistensi modal sosial di masyarakat. Demikian halnya faktor informasi dan komunikasi, karena sebagian besar literasi informasi masih rendah. Sehingga diperlukan upaya serius dalam meningkatkan tingkat literasi membaca dan informasi dan teknologi pada masyarakat. Strategi pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya tugas sosial yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan interaksi individu dengan lingkungan sosial sesuai dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Kata kunci: kemiskinan, modal sosial, kesenjangan sosial ekonomi

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Formasi Modal Sosial di Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember

Peneliti : Ciplis Gema Qori'ah, SE, M.Sc¹
Mahasiswa Terlibat : 1. Lailatul Maghfiroh, SE²
2. Cintya Meidia Tama³
3. Mela Yunita⁴
4. Ika Nurjannah⁵
Kontak Email : ciplis_qoriah@yahoo.com, ciplis.qoriah@gmail.com
Sumber Dana : DIPA/ BOPTN Universitas Jember
Diseminasi : Belum ada

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan ekonomi yang kompleks dan bersifat multidimensi yang menyangkut beberapa aspek; diantaranya aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Oleh karenanya dalam perspektif teori kemiskinan tidak saja dipengaruhi secara dominan faktor ekonomi, namun juga dalam ranah keilmuan sosial (Hatzius et. al, 1994). Selain itu, secara umum kondisi kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan. Kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*poverty*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat, 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya dilihat dari tingkat pendapatan rendah, tetapi juga ditentukan faktor lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kriminal, ketidakberdayaan kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Jawa Timur mengalami tren yang menurun. Pada bulan Maret 2009, jumlah penduduk miskin sebesar 6,02 juta, dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 6,651 juta. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur turun sebesar 628,69 ribu jiwa. Selama periode Maret 2008-Maret 2009,

penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 466,57 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 162,12 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2009, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan yaitu 64,32%, sedangkan di perkotaan sebesar 35,68%. Turunnya persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008 – Maret 2009 merupakan upaya Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menyikapi krisis ekonomi global. Adapun program-program yang digencarkan Pemerintah antara lain program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kelompok maupun klaster usaha.

Kabupaten Jember menempati *pole position* jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial pada September tahun 2011 dan Susenas bulan Maret 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebanyak 237.700 kepala keluarga (KK) tertinggi dibandingkan 37 kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan posisi kedua ditempati Bondowoso dengan 167.366 kepala keluarga (KK). Ketiga ditempati kabupaten Malang dengan jumlah 155.845 kepala keluarga (KK). Sekitar 2,3 juta jumlah penduduk di Kabupaten Jember jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso hanya sekitar 800 ribu atau sepertiga dari jumlah penduduk Kabupaten Jember. Sehingga berdasarkan prosentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Jember.

Penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang persisten, upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih belum komprehensif. Kondisi masyarakat miskin masih tetap sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, sosial dan politik serta bencana alam yang terjadi diberbagai daerah. Sumber kelemahannya adalah kebijakan yang bersifat sentralisasi, fokus pada pertumbuhan makroekonomi, pandangan kemiskinan yang berorientasi ekonomi, penempatan masyarakat sebagai obyek dan anggapan bahwa masalah dan pengelolaan kemiskinan bersifat seragam di seluruh negeri. Selain itu, adanya beberapa versi dalam mengukur angka kemiskinan menyebabkan terjadinya kebimbangan dan perdebatan mengenai angka dan definisi kemiskinan. Beberapa jenis pengukuran yang berbeda-beda, mengakibatkan program yang telah disusun

dan dijalankan pemerintah tidak dapat maksimal dilaksanakan. Beberapa kelemahan dari beberapa jenis pengukuran tersebut antara lain tidak menggambarkan ciri khas lokal (misalnya, kondisi perumahan atau preferensi makanan setempat), tidak menyentuh konteks kemiskinan (misalnya, tidak ada dari model tersebut yang berhubungan dengan sumberdaya alam atau konteks sosial), data yang ada sering kontradiktif, tidak terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan kondisi kemiskinan di Kabupaten Jember
- b. Mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan di wilayah perkotaan Kabupaten Jember
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan alternatif program penanggulangan kemiskinan melalui formasi modal sosial masyarakat miskin di wilayah perkotaan di Kabupaten Jember

3. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode antara lain observasi, survei rumah tangga dan wawancara informal semi terstruktur untuk melakukan pendalaman materi kepada berbagai pihak yang terkait. Sedangkan untuk analisis data digunakan statistik perhitungan indeks rumah tangga miskin untuk pemetaan kemiskinan, statistik deskriptif untuk mengevaluasi program kebijakan Pemerintah Daerah.

3.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif naratif, yaitu mendiskripsikan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk narasi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan kata lain penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan melukiskan fenomena dengan

jalan mendeskripsikan sejumlah variabel-variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat penggambaran secara tegas (*descriptive assertions*) tentang populasi yang menemukan distribusi dari beberapa atribut.

3.2 Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terarah adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan satu topik tertentu secara lebih mendalam. Wawancara kelompok pada dasarnya adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang wawancaranya dipandu oleh moderator dengan cara baik secara terstruktur atau pun tidak terstruktur, bergantung pada maksud dan tujuan wawancara. Pertanyaan dan pembicaraan yang berlangsung didata dan selanjutnya ditulis dengan cermat yang akan digunakan untuk membuat deskripsi dan analisa setelah diskusi berakhir.

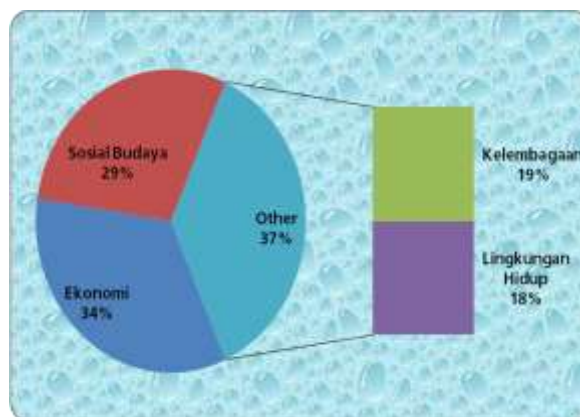
3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi deskriptif melalui survei kepustakaan dan survei lapangan melalui *depth interview*. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka (*open-ended questions*) dan tertutup (*closed-ended questions*). Kuesioner yang bersifat terbuka hanya digunakan untuk tahapan awal penelitian, yang ditujukan untuk menangkap gambaran umum kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk tahapan penelitian lebih lanjut digunakan kuesioner yang bersifat tertutup. Wawancara dilakukan pada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan tokoh masyarakat serta perusahaan perkebunan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang karakteristik sosial ekonomi masyarakat, persepsi masyarakat terhadap permasalahan kemiskinan. Wawancara juga dilakukan pada pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat terkait dengan tujuan untuk menangkap persepsi para ahli yang mengerti permasalahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Jember.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Determinan Kemiskinan di Kabupaten Jember

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dialami semua daerah. Permasalahan klasik kemiskinan adalah identifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi, bahwa secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya, perbedaan kualitas sumberdaya manusia dan akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori *vicious circle* yang merupakan permasalahan tidak terputus.



Gambar 4.1: Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia pada tahun 2010 mengenai kemiskinan di Kabupaten Jember bahwa aspek/dimensi tertinggi yang masih menjadi penyebab kemiskinan di Kabupaten Jember menurut persepsi *expertise* kemiskinan adalah masalah ekonomi yaitu 34%, diikuti aspek sosial dan budaya 29% dan kelembagaan 19% serta lingkungan 18%. Permasalahan utama penyebab kemiskinan di tiga wilayah yaitu Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Patrang adalah masalah ekonomi utamanya akses pada kesempatan kerja dan akses pada kepemilikan aset lahan garapan karena mayoritas masyarakat Kabupaten Jember bekerja di sektor pertanian. Permasalahan penyebab kemiskinan lainnya adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang disebabkan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Maka tak dapat dipungkiri bahwa selain masalah ekonomi, diperlukan agenda utama yang prioritas dalam meningkatkan jumlah masyarakat untuk menempuh pendidikan formal maupun informal dan

disertai dengan ketersediaan infrastruktur dan mutu pendidikan yang memadai. Faktor lain yang cukup berpengaruh sebagai penyebab kemiskinan adalah peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yang memerlukan perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember. Begitu halnya kondisi lingkungan, buruknya sanitasi, maupun ketersediaan lahan masih sangat terbatas. Padahal jika melihat karekteristik budaya maupun geografis, Kabupaten Jember memiliki *endowment* agraris yang cukup potensial.

4.2 Formasi Modal Sosial Masyarakat

Batasan kemiskinan bukan hanya terbatas pada domain ekonomi dalam pemenuhan *basic need*, namun juga ditentukan oleh peran lingkungan pendukung sebagai sebuah sistem. Kohesi sosial menjadi salah satu lingkungan pendukung yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan rumah tangga miskin. Berkaitan dengan identifikasi terhadap formasi modal sosial yang ada di masyarakat, penelitian ini secara khusus menggunakan tiga sampel wilayah kecamatan yang termasuk dalam kategori wilayah perkotaan (*urban region*) yaitu Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Patrang. Tujuan dari identifikasi formasi modal sosial untuk mengetahui kelembagaan dan mekanisme interaksi yang terbentuk antar individu di daerah perkotaan terhadap proses pembangunan ekonomi maupun sosial budaya.

4.3 Profil Umum Responden

Rumah tangga merupakan satuan lingkungan terkecil yang memegang peranan penting dalam tata pemerintahan. Profil responden rumah tangga miskin yang dijadikan sampel dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditempuh, umur, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan keluarga, jumlah keluarga dalam rumah tangga, suku daerah anggota rumah tangga. Wilayah yang menjadi obyek penelitian terbagi dalam tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Patrang. Berikut adalah profil responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

Tabel 4.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin (%)	
	Laki-laki	Perempuan
Kaliwates	53,6	46,4
Sumbersari	40,6	59,5
Patrang	28,6	71,4

Sumber : Data primer, diolah, 2013

Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata responden adalah perempuan untuk kecamatan Summersari dan Patrang sementara kecamatan Kaliwates lebih didominasi responden laki-laki, sehingga rata-rata pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga dan sebagian lainnya pedagang, buruh tani dan beragam jenis pekerjaan lainnya. Kisaran umur responden adalah antara 35-50 tahun yang masih tergolong usia produktif sebagai angkatan kerja. Kondisi ini mengindikasikan kemampuan responden untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih cukup potensial.

**Tabel 4.2
Struktur Pendidikan Terakhir Responden**

Tingkat Pendidikan (%)	Kecamatan		
	Kaliwates	Sumbersari	Patrang
Tidak Bersekolah	17,9	43,8	26,2
SD	21,4	40,6	61,9
SMP	28,6	9,4	2,4
SMA	32,1	6,3	9,5
Perguruan Tinggi	-	-	-

Sumber : Data primer, diolah, 2013

Salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendidikan yang ditempuh. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, rata-rata tidak tamat SD atau tidak sekolah dan tamatan SD terutama banyak terkonsentrasi di Kecamatan Summersari dan Patrang. Sementara di Kecamatan Kaliwates rata-rata terdistribusi normal pada setiap jenjang pendidikan terutama sekolah menengah pertama dan atas. Masih rendahnya pendidikan responden akan berdampak pada pola pikir dan etos kerja atau produktivitas anggota keluarga miskin.

Faktor lain yang tak kalah penting dalam mempengaruhi modal sosial adalah suku daerah atau etnis masyarakat. Suku daerah yang ada dalam masyarakat akan mencirikan budaya yang ada di suatu masyarakat. Peran budaya menentukan pola pikir dan perilaku masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah. Bila dilihat dari mayoritas suku daerah responden adalah Madura. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Jember yang multi-etnik yaitu Madura dan Jawa terutama pada wilayah tengah atau pusat kota Kabupaten Jember. Sebaran karakteristik suku Madura umumnya terkonsentrasi di wilayah utara Kabupaten Jember dan suku Jawa umumnya tersebar di wilayah selatan.

Dilihat dari susunan anggota keluarga, rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga miskin dihuni oleh tiga hingga lima orang. Sedangkan jumlah anak laki-laki yang masih hidup dibawah umur 17 tahun dan anak perempuan dibawah usia 17 tahun sama yaitu rata-rata satu orang dalam satu RTM. Hal ini menunjukkan kondisi normal untuk jumlah anak di bawah usia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan keluarga dan akan menentukan kelayakan dan kualitas kesejahteraan keluarga.

4.4 Pemetaan Modal Sosial

4.4.1 Ketersediaan Kelompok dan Jejaring Kerja

Pembentukan kelompok dalam masyarakat sangat penting dalam membangun kebersamaan dan saling memiliki satu sama lain (*sense of belonging*) baik kaitannya dalam konteks hubungan sosial, budaya maupun ekonomi yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Banyak ragam kegiatan yang menggambarkan kelompok bersama seperti kegiatan sosial keagamaan, kegiatan rutin PKK, dasa wisma, kerja bakti lingkungan dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial yang banyak diikuti oleh masyarakat di tiga kecamatan adalah kegiatan keagamaan seperti pengajian hampir 50 persen dan kegiatan sosial lainnya seperti PKK, arisan, asosiasi pedagang dan pengrajin dan kerja bakti sosial. Keikutsertaan masyarakat dalam acara sosial tersebut cukup tinggi seperti di kecamatan Kaliwates mencapai 89,5 persen, Sumbersari 92 persen dan Patrang secara keseluruhan aktif mengikuti kegiatan. Umumnya kegiatan sosial diadakan dengan letak hunian yang berdekatan atau dalam satu lingkungan atau komunitas. Beragam motivasi responden untuk mengikuti

kegiatan sosial yang rata-rata atas dasar suka rela, diajak bergabung dan sebagian lainnya dipaksa atau diwajibkan. Keterlibatan warga dalam kegiatan sosial umumnya bertambah, yang berarti mengindikasikan adanya tingkat partisipasi dan antusiasme warga untuk bergabung dalam kelompok sosial cukup tinggi.

Tabel 4.3
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Sosial

Jumlah Keikutsertaan (%)	Kecamatan		
	Kaliwates	Sumbersari	Patrang
Bertambah	80	72	37,8
Tetap	-	24	56,8
Berkurang	20	4	5,4

Sumber : Data primer, diolah, 2013

Manfaat yang dirasakan warga dengan mengikuti kelompok sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual karena umumnya kegiatan yang diikuti warga adalah kegiatan keagamaan, untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan aktualisasi diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Kondisi ini sesuai dengan kelompok masyarakat yang paling besar peranannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yaitu kegiatan keagamaan dan PKK. Umumnya warga yang tergabung dalam kelompok sosial memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda-beda seperti agama, usia, etnis, pekerjaan, tingkat pendidikan dan politik. Namun umumnya tinggal di pemukiman yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi yang berbeda di masyarakat tidak mempengaruhi minat warga untuk bergabung dalam kegiatan sosial karena manfaat yang diperoleh bukan hanya manfaat ekonomi namun juga yang terpenting adalah manfaat sosial yaitu menjaga hubungan kekerabatan antar anggota masyarakat. Ikatan kelompok bukan hanya terjalin di antara sesama anggota namun juga dengan kelompok lainnya baik di komunitas yang sama maupun di luar komunitas. Hubungan sosial antar masyarakat dalam wadah kelompok terjadi dalam lintas geografis dengan beragam karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu modal sosial yang ada di masyarakat menjadi modal utama dalam memberdayakan masyarakat dalam beragam aktifitas untuk mencapai kesejahteraan.

Tingkat partisipasi masyarakat juga tampak dalam kesediaannya membayar iuran kelompok yang sebagian besar berasal dari anggota kelompok dan sebagian kecil lainnya berasal dari sumber lain baik dalam komunitas maupun di luar komunitas. Penguatan kerjasama kelompok juga tampak dari beragam masukan yang sebagian besar dari sesama anggota dan sumber lainnya. Penguatan kelembagaan sosial yang terbentuk di masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dan tokoh masyarakat yang ada di masyarakat. Peran pemerintah dalam mendukung kelembagaan sosial sangat diperlukan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan di masyarakat. Sementara peran tokoh masyarakat khususnya tokoh agama menjadi sangat penting sebagai tokoh yang mampu mewakili dan menampung aspirasi masyarakat. Inisiasi pembentukan kelompok bukan hanya dari pemerintah dan tokoh masyarakat, namun juga dimungkinkan dibentuk oleh komunitas kelompok, sementara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam hal ini dapat menjadi fasilitator dalam pembentukan kelompok.

Tabel 4.4
Inisiator Pembentukan Kelompok Sosial

Inisiator	Kecamatan		
	Kaliwates	Sumpangsari	Patrang
Pemerintah Pusat	9,5	7,7	-
Pemerintah Daerah	9,5	3,8	5,4
Tokoh Masyarakat	28,6	88,5	78,4
Komunitas	52,4	-	16,2

Sumber : Data primer, diolah, 2013

4.4.2 Kepercayaan dan Solidaritas

Modal sosial yang terbentuk di masyarakat bukan hanya ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, namun eksistensi modal sosial juga harus diperkuat oleh tingkat kepercayaan dan solidaritas kuat yang dijalin antar anggota masyarakat. Hal ini dapat diindikasikan melalui rasa saling percaya dan saling tolong menolong antar warga masyarakat dengan beragam latar belakang. Seluruh responden pada tiga kecamatan menyatakan persepsinya bahwa sebagian besar orang-orang disekeliling mereka dapat dipercaya. Di Kecamatan Kaliwates 34 persen menyatakan setuju sebagian besar orang yang bermukim di sekitar lingkungan dapat dipercaya, di Kecamatan Sumpangsari 34 persen dan kecamatan Patrang 36,9 persen. Begitu halnya

dengan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan perlunya kesadaran tolong menolong antar anggota masyarakat. Namun untuk persepsi mengenai kepercayaan dalam meminjam uang menyatakan bersikap netral. Hal ini berarti tingkat kepercayaan masyarakat yang terkait masalah sosial cukup tinggi namun berbeda pada tingkat kepercayaan diukur dari satuan moneter yang masih kurang.

Tabel 4.5
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lingkungan Sekitar di Kecamatan Kaliwates (dalam persen)

Karakter Lingkungan	Tidak Percaya	Ragu-ragu	Percaya	Sangat Percaya
Etnisitas yang sama	-	39,3	42,9	17,9
Etnisitas berbeda	7,1	71,4	31,4	-
Penunggu toko/warung	10,7	67,9	21,4	-
Aparat pemerintah daerah	25	60,7	14,3	-
Aparat pemerintah pusat	17,9	53,6	21,4	-
Polisi	35,7	53,6	7,1	3,6
Guru	3,5	50	42,9	3,6
Dokter/perawat	3,6	64,3	28,6	3,6
Tokoh agama	3,6	3,6	50	42,9
Tokoh politik	42,8	46,4	10,7	-
Orang yang tidak dikenal	74	28,6	-	-

Sumber : Data primer, diolah, 2013

Tingkat kepercayaan masyarakat berbeda-beda pada orang di lingkungan sekitar. Seperti di kecamatan Kaliwates ketidakpercayaan yang cukup tinggi pada orang tak dikenal, indikasi ini menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan masyarakat cukup baik terhadap orang yang tidak dikenal di pemukiman mereka. Kewaspadaan dalam membangun rasa aman pada individu, keluarga maupun komunitas cukup tinggi. Namun hal berbeda ditunjukkan pada tingkat kepercayaan terhadap aparat pemerintah termasuk polisi dan tokoh politik cukup yang rendah. Fenomena ini menjadi masalah krusial yang memerlukan upaya penanganan yang serius dari segenap elemen masyarakat termasuk pemerintah mengingat posisi strategis aparat pemerintah melalui fungsi dan tugasnya menjadi wakil masyarakat yang memberikan layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan internal maupun eksternal pada kinerja aparatur negara.

Hal yang sama terjadi di Kecamatan Sumpalsari dan Patrang bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan juga sangat rendah. Namun hal menarik adalah sebagian besar masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada sosok dengan aktifitas yang berkaitan norma sosial dan keagamaan seperti tokoh masyarakat, guru, dokter dan perawat. Sementara untuk kepercayaan pada orang dari etnis yang sama untuk kecamatan Kaliwates dan Sumpalsari cukup tinggi karena adanya ikatan kekerabatan dengan karakteristik sama. Namun hal berbeda di kecamatan Patrang yang cenderung tidak percaya dengan orang-orang meskipun memiliki etnis yang sama begitu halnya dengan etnis berbeda.

Tabel 4.6
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lingkungan Sekitar
di Kecamatan Sumpalsari (dalam persen)

Karakter Lingkungan	Tidak Percaya	Ragu-ragu	Percaya	Sangat Percaya
Etnisitas yang sama	3,1	62,5	34,4	-
Etnisitas berbeda	46,9	53,1	-	-
Penunggu toko/warung	25	53,1	21,9	-
Aparat pemerintah daerah	28,1	46,9	25	-
Aparat pemerintah pusat	28,1	65,6	3,1	3,1
Polisi	12,5	84,4	3,1	-
Guru	-	81,3	18,8	-
Dokter/perawat	3,1	87,5	9,4	-
Tokoh agama	9,4	71,9	18,7	-
Tokoh politik	28,1	65,6	6,3	-
Orang yang tidak dikenal	46,9	43,8	6,3	3,1

Sumber : Data primer, diolah, 2013

Terlepas dari kekurangpercayaan masyarakat pada aparat pemerintah, namun tingkat saling tolong menolong cukup tinggi dengan selalu membantu warga lain yang mengalami kesusahan. Begitu halnya bila ada program-program pemerintah baik yang tidak berdampak langsung, warga masyarakat bersedia membantu baik dalam bentuk tenaga, uang maupun saran dan fasilitas.

Tabel 4.7
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lingkungan Sekitar
di Kecamatan Patrang (dalam persen)

Karakter Lingkungan	Tidak Percaya	Ragu-ragu	Percaya	Sangat Percaya
Etnikstias yang sama	33,4	19	45,2	2,4
Etnikstias berbeda	38,1	26,2	35,7	-
Penunggu toko/warung	14,3	33,3	52,4	-
Aparat pemerintah daerah	14,3	33,3	52,4	-
Aparat pemerintah pusat	40,4	38,1	21,4	-
Polisi	50	28,6	21,4	-
Guru	-	23,8	71,4	4,8
Dokter/perawat	11,9	28,6	57,1	2,4
Tokoh agama	4,8	33,3	57,1	4,8
Tokoh politik	57,1	35,7	7,1	-
Orang yang tidak dikenal	47,6	28,6	23,8	-

Sumber : Data primer, diolah, 2013

4.4.3 Aksi Kolektif dan Kerjasama

Aksi kolektif dan kerjasama antar warga sangat menentukan eksistensi modal sosial di masyarakat. Secara rata-rata masyarakat pernah bekerja sama dengan warga lain di lingkungannya seperti dalam kegiatan keagamaan dan kerja bakti lingkungan. Rata-rata jangka waktu mengikuti kegiatan adalah lima hingga sepuluh hari. Apabila ada warga yang tidak berpartisipasi tidak pernah atau kadang-kadang diberi teguran atau sanksi. Begitu halnya apabila ada kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama semua warga terlibat, namun hal berbeda terjadi di kecamatan Kaliwates yang hanya sebagian warga yang terlibat dan bekerja sama. Kondisi ini menunjukkan tingkat solidaritas masyarakat untuk saling membantu dan bekerjasama cukup tinggi kecuali di Kecamatan Kaliwates yang memang umumnya hubungan sosial masih kurang disebabkan masih tingginya ketimpangan sosial yang ada di masyarakat.

4.4.4 Informasi dan Komunikasi

Salah satu faktor penting lainnya dalam memperkuat modal sosial di masyarakat adalah peran media informasi dan komunikasi termasuk layanan sosial lainnya seperti fasilitas penerangan jalan dan akses pada fasilitas publik. Untuk fasilitas penerangan rumah umumnya warga sudah mendapatkan layanan listrik dari PLN, hanya sebagian kecil warga di Kecamatan Sumpalsari dan Patrang yang belum

mendapatkan fasilitas listrik begitu halnya dengan penerangan jalan umum. Akses pada layanan pos terdekat juga mudah dijangkau hanya dengan waktu 15 hingga 30 menit. Sehingga secara agregat akses layanan publik sudah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara untuk layanan media informasi umumnya warga tidak pernah membaca surat kabar, hal ini disebabkan masih banyaknya warga yang kurang paham dan tidak memiliki surat kabar. Rendahnya minat membaca masyarakat melalui media massa ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam menggerakkan minat baca masyarakat, salah satunya dapat melalui pemasangan surat kabar pada papan pengumuman yang dekat dengan fasilitas publik seperti di pasar tradisional, sekolah dan fasilitas publik lainnya agar bisa diakses seluruh warga. Begitu halnya dengan media komunikasi radio, hanya kurang dari seminggu sekali warga memanfaatkan media informasi ini.

4.5 Strategi Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan tugas sosial, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia
- b. Untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga masyarakat
- c. Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institusi-institusi sosial maupun status
- d. Memperkuat dan memperbaiki tertib sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.

5. Simpulan

1. Ketersediaan Kelompok dan Jejaring Kerja. Kegiatan sosial yang banyak diikuti oleh masyarakat adalah kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial seperti PKK, kerja bakti sosial. Keikutsertaan masyarakat dalam acara sosial tersebut cukup tinggi. Umumnya warga yang tergabung dalam kelompok sosial memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda-beda seperti agama, usia, etnis, pekerjaan, tingkat pendidikan dan politik.
2. Kepercayaan dan Solidaritas. Kepercayaan masyarakat terhadap sebagian besar orang-orang disekelilingnya dapat dipercaya. Begitu halnya dengan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan perlunya kesadaran tolong menolong antar anggota masyarakat. Namun untuk persepsi mengenai kepercayaan dalam meminjam uang menyatakan bersikap netral.
3. Aksi Kolektif dan Kerjasama. Aksi kolektif dan kerjasama antar warga sangat menentukan eksistensi modal sosial di masyarakat. Sebagian besar masyarakat bekerja sama dengan warga lain di lingkungannya.
4. Informasi dan Komunikasi. Sebagian besar literasi informasi masih rendah. Sehingga diperlukan upaya serius dalam meningkatkan tingkat literasi membaca dan informasi dan teknologi pada masyarakat.
5. Strategi Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan. Diperlukan adanya tugas sosial yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan interaksi individu dengan lingkungan sosial sesuai dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.